SEMINAR NASIONAL
PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
PERKOTAAN DI
INDONESIA

Masalah, Tantangan
dan Peluang dalam
Menghadapi Era
Globalisasi

Jakarta
26-27 Juli 2005

FAKULTAS
ARSITEKTUR LANSEKAP
dan
TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI
2005

ISBN 979-8398-85-8

PROSIDING

S.E.M.I.N.A.R N.A.S.I.O.N.A.L

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Masalah, Tantangan Dan Peluang
Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Jakarta, 26 - 27 Juli 2005

Panitia Seminar Nasional
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA
FALTL - Universitas Trisakti, Kampus A Gedung K, Lantai 7
Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol - Jakarta 11440
Telpon: +62.21.5663232 ext 764, 767
Fax: +62.21.5602575
Website : http:// www.trisakti.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

SEMINAR NASIONAL
PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
PERKOTAAN DI
INDONESIA

Masalah, Tantangan
dan Peluang Dalam
Menghadapi Era
Globalisasi

Jakarta
26-27 Juli 2005

FAKULTAS
ARSITEKTUR LANSEKAP
dan
TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI
2005

ISBN 979-8398-85-8

PROSIDING

S.E.M.I.N.A.R N.A.S.I.O.N.A.L

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Masalah, Tantangan dan Peluang Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Jakarta, 26 - 27 Juli 2005

Panitia Seminar Nasional
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA
FALTL - Universitas Trisakti, Kampus A Gedung K, Lantai 7
Jl. Kyai Tapa No 1 Grogol - Jakarta 11440
Telpon : +62.21.5663232 ext 764, 767
Fax : +62.21.5602575
Website : http:// www.trisakti.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Masalah, Tantangan, dan Peluang dalam Menghadapi Era Globalisasi
Jakarta, 26 - 27 Juli 2005

@trisakti.ac.id

PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI PRESS (Anggota IKAPI)
Jl. Kyai Tapa No 1, Jakarta 11440
INDONESIA
Telepon : +62.21 5663232 ext 175
Fax : +62.21 5663232 ext 175
Website : www.trisakti.ac.id

Cetakan Pertama 2005

ISBN 979-8398-85-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Universitas Trisakti

Dipindai dengan CamScanner

SUSUNAN PANITIA

Dewan Pelindung	:	Dekan FALTL
Dewan Pengarah	:	Wakil Dekan I
		Wakil Dekan II
Penanggung Jawab	:	Ketua Jurusan Arsitektur Lansekap
		Ketua Jurusan Teknik Lingkungan
		Ketua Jurusan Teknik Planologi
	:	Ir. Amir Susanto Padmoprayitno, SKM
Panitia Pelaksana		
Ketua	:	Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS
Sekretaris	:	Rositayanti Hadisoebroto, ST, MT
		Irmawati
		Heriyanto
Bendahara	:	Ir. Silia Yuslim, MT
		Drs. Kismartono
Seksi Persidangan dan Materi	:	Ir. Ratnaningsih, MT
		Ir. Benny Benyamin Suharto, MSi
		Ir. Eko Adhy Setiawan, MT
		Ir. Ramadhani Yanidar, MT
		Ir. Endrawati Fatimah, MPSt
		Jumroni
Seksi Konsumsi	:	Ir. Asih Wijayanti, MS
		K. Yuantini
		Elly Resmiati
Seksi Acara dan perlengkapan	:	Dra. Astri R. Nugroho, MT
		Ir. Mawar DS Silalahi, MSi
		Supardi
		Agus Wahyudi
		Herman
Seksi Humas & Sponsorship	:	Ariani Dwi Astuti, ST, MT
		Pramiati Purwaningrum, ST, MT
		Drs. Suhanto PS
		Indra Suhara
Seksi Transportasi & Dokumentasi	:	Wawa Rukanda
		Suratman
		Tardjo
		Ateng Muhidin
Seksi Dekorasi	:	Ir. Etty Indrawati, MSi
		HMJ AL, TL, PL

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Susunan Panitia i
Daftar Isi iii
Daftar Peserta vii
Daftar Acara xi
Laporan Ketua Pelaksana : *Dr. Melati Ferianita-Fachrul* xix
Makalah Utama : 1. *Aca Sugandhy, Ir, MSc*
Ancaman Pembangunan Tanpa Pertimbangan Arsitektur Lansekap Yang Berwawasan Lingkungan 3
2. *Tatag Wiranto, Ir, MURP*
Pengembangan Kelembagaan Manajemen Perkotaan 21
3. *Asis H.Djajadiningrat, Prof. Dr. Ir. Dipl.SE*
Strategi Pengelolaan Lingkungan dalam Mencapai Kota yang Berkelanjutan 25

MATERI - 1 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sigit Wijaksono, Ir, MSi
Ada yang salah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan 37

Melati Ferianita Fachrul, DR. MS,
Diana Hendrawan, Ir. MS
Kondisi Kualitas Perairan Teluk Jakarta :
Pendekatan dengan Metode Penentuan Parameter Kimia dan Biomonitoring 45

Diana Hendrawan, Ir. MS;
Melati Ferianita Fachrul, DR. MS
Kajian Kualitas Air Terhadap Fitoplankton Di Situ Babakan Jakarta Selatan 55

Samsuhadi, Ir. MSc
Pemanfaatan Air Tanah Jakarta 65

Erwin Iskandar, DR.; Arief Rachmat, Ir., MT
Distribusi Daerah Resapan DKI Jakarta, Melalui Pendekatan Infiltrasi Dan Iklim 81

M. Imron Rosyidi, Moehamad Aman
Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengelolaan Dan Penyelamatan Airtanah 91

Ramadhani Yanidar, Ir. MT
Model Dinamik Kuantitas Air Waduk 99

MATERI – 2 : PENCEMARAN dan TEKNOLOGI PENGENDALIAN

Affan Rifa'I
Efek Gas Sisa Proses Pengecatan Mobil Pada Kesehatan dan Solusi Penempatan Operator Pengecatan Yang Aman dan Ideal Terutama Pada Bengkel Karoseri 111

Moediartianto
Reconsider The Use Of Renewable Energy Towards Sustainable Urban Development 117

Hernani Yulinawati
The Environmental Livability of Jakarta Mega-Urban Region (Jabodetabek) 125

Soekmana Soma, .Ir, MSP, M.Eng, Dr
Sistem Pengelolaan Sampah Kota: Sentralisasi atau Desentralisasi? 133

Dwi Indrawati, Ir. MSi
Tinjauan Aspek Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta 143

Dipindai dengan CamScanner

R. Sarwono
Pengomposan Sampah Kota Menunjang Lingkungan Perkotaan 151

Tamara Dirasutisna, Ir. MSi
Pemanfaatkan Sampah Sebagai Bahan Campuran Atau Bahan Terikat 159

Asih Wijayanti
Pemanfaatan Limbah Padat (*Sludge*) Elektroplating (B3) Menjadi Balok Paving Dengan Metode Solidifikasi
(Study Kasus Pt. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 165

MATERI – 3 : PERMUKIMAN PERKOTAAN

Sri Amiranti
Pendekatan "Place Attachment" Dalam Manajemen Lingkungan Sosial Perkotaan Untuk Kegiatan Relokasi Permukiman Penduduk 175

Turniningtyas A. R
Bermukim di Perbatasan Kota, Studi Kasus: Permukiman di sekitar Pondok Tjandra Kecamatan Waru Perbatasan Kabupaten Sidoardjo dan Kota Surabaya 181

John Fredy Bobby Saragih. Ir. MSi.P
Sekilas Tentang Ruang Bermain Anak Di Perumahan Sederhana Study Kasus : Perumnas Tangerang 189

Fashbir Noor Sidin, SE, MSP, Dr
Geragau Perkembangan Permukiman Dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan 197

Fauzul Rizal Sutikno dan Hendrawan H. Saragih
Studi Permukiman Pekerja Industri Di Sekitar Kawasan Sier 199

Fadly Usman, ST, MT
Menyoal Produk Disain Perancang Bangunan (Arsitek); Konsep, Idealisme, dan atau Hasil Kompromi?
Studi Kasus: Hasil Disain Bangunan Rumah Tinggal dan RTRK di Surabaya 209

Widya Suryadini, Winia Farida
Pengukuran Tingkat Daya Hidup Kota Indonesia (Studi Kasus Kota Bandung) 215

MATERI – 4 : PEDESTRIAN / TRANSPORTASI PERKOTAAN

St. Trikariastoto
Ruang Jalan Lansekap Kota yang Dilupakan 225

Endang Widjajanti, Ir. MT
Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Perkotaan 231

Bambang Heryanto
Karakteristik Ruang Marjinal Pada Lansekap Kota 239

M. Zainuddin Noor, Ir, MT
Peningkatan Kualitas Visual Koridor Jalan Akan Sejalan Dengan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pemakai Jalan. 251

Kartiko E. Putranto,Yustiar Gunawan, Ermawan D. Setiadi
Dukungan Audit Teknologi Dalam Merencanakan Dan Mengembangkan Transportasi Umum Perkotaan 259

Tono Sukarnoto
Mencari Desain Bus Kota Yang SesualUntuk Jakarta 265

Decky Febrianda, Voltaria Febita, Hermawan
Kajian Dampak Perubahan Stasus Bandara Ahmad Yani Terhadap Penyediaan Prasarana Kota 271

Dipindai dengan CamScanner

MATERI – 5 : PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Endrawati Fatimah
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota /Kabupaten Dengan Pendekatan Geografis Dalam Upaya Pelestarian DAS 279

Budi Prayitno, Ir. M.Eng. Dr.
Pemodelan Lansekap Kota Tepian Air Kepulauan Tropis Nusantara 285

Hardiyati dan Eki Arsita Rizki
Kali Pepe Solo Sebagai Karamba Kota Pengembangan Segmental Kali Pepe Solo, Sebagai Potensi Wisata, Sosio-kultural dan Ekonomi 295

M. Irfan Affandi
Perencanaan Kawasan Agropolitan Dalam Pengembangan Perkotaan 311

Kustomo Usman
Strategi Pembangunan Kota-Kota Baru Melalui Program Transmigrasi 317

Qurrotu 'Aini Besila, Ir., Msi
Strategi Pengembangan Ekowisata Perkotaan 325

Felia Srinaga
Potensi Pengembangan Kota Jakarta Sebagai Salah Satu Tujuan Wisata: Integrasi Aktivitas (Kegiatan), Ruang dan Waktu 331

Hanny W. Wiranegara, Ir, MT
Kerjasama Antar Daerah Dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan Metropolitan (kasus: Jabodetabek) 339

MATERI – 6 : PERMASALAHAN BANJIR PERKOTAAN

Hary Agus Rahardjo, Dr. Ir
Banjir, Bencana Yang Telah Menjadi Budaya: Solusi Alternatif dengan Pendekatan Sosial dan Institusional 349

Hani Burhanudin
Desain Water Level Menuju Pembangunan Perkotaan Bebas Banjir 355

Isamoe Prasodyo, Ir. MSi
Alternatif Peningkatan Resapan Air Permukaan Sebagai Usaha Mengatasi Masalah Air Genangan Kawasan Lansekap Perkotaan 361

Wahyu Budi Setyawan
Banjir Di Kota Pesisir, Upaya Penanggulangan Dan Prediksi Implikasinya: Studi Kasus Kota Jakarta 369

Titien Suryanti R
Konservasi Habitat Owa Jawa *(Hylobates Moloch* Audebert 1797) Sebagai Pengatur Tata Air Bagi Wilayah Kota Bogor, Lebak, Dan Sukabumi 379

Gindo Maraganti Hasibuan, Ir, MM
Pengelolaan Terpadu Banjir Kota Medan (Studi Kasus Banjir Kota Medan) 385

Ida A.S Danur, Ir, MSi
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dan Permasalahan Banjir Studi Kasus : Desa Adat Tenganan Pegringsingan 399

Rahel Situmorang, Ir, MPlan
Usulan Bagi Pengendalian dan Pemecahan Masalah Banjir di Jakarta 405

Agus Guntoro
Informasi Geologi Dalam Upaya Mitigasi Bencana Geologi Di Lingkungan Perkotaan 411

Dipindai dengan CamScanner

MATERI – 7 : LANSEKAP PERKOTAAN

Rustam Hakim
Aspek Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Nilai Tambah Pada Kawasan Perumahan Perkotaan 423

Bambang Soemardiono
Kajian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Koridor Kota Surabaya 433

Haryadi Wijayanto, Ir., MT
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan RTH Kota 441

Hilwati Hindersah
Keberhasilan Konservasi Ruang Terbuka Hijau Di Lingkungan Perkotaan Studi Kasus : Eksistensi Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Metropolitan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, Propinsi Bali 447

Widjaja Martokusumo. Ir. Dr.Ing
Konservasi Lingkungan Perkotaan dan senibina kota 455

Untung Mardikamo, Ir. MSn
Make Up Your Face (Fenomena Pencemaran Visual Terhadap Wajah Lingkungan/ Ruang Terbuka Kota) 463

MATERI – 8 : SEKTOR INFORMAL

Agung Witjaksono, ST. MTP
Bagaimana Kegiatan Sektor Informal (PKL) Dapat Mendukung Perkembangan Kota? 473

Suparwoko, Ir. MURP. PhD
Pola hubungan sektor formal – informal di perkotaan: Studi kasus kegiatan PKL di Sleman Yoyakarta 479

Petrus Natalivan dan Sigit Dwiananto
Internalisasi Sektor Informal Dalam Rencana Tata Ruang: Peluang dan Hambatannya 491

Petrus Natalivan dan Sigit Dwiananto
Zoning Regulation Sebagai Perangkat Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Mewujudkan *Zoning Regulation* Sebagai Perangkat Pendukung Rencana Tata Ruang 499

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ACARA (HARI PERTAMA)

Selasa, 26 Juli 2005

	RUANG I *MATERI* *PENGELOLAAN LINGKUNGAN*	RUANG II *MATERI PENGEMBANGAN* *KAWASAN PERKOTAAN*	RUANG III *MATERI* *PERMUKIMAN PERKOTAAN*	RUANG IV *MATERI* *LANSEKAP PERKOTAAN*
14.45 – 16.15	Samsuhadi, Ir. MSc ***Pemanfaatan Air Tanah Jakarta***	Budi Prayitno, Ir. M.Eng. DR **Pemodelan Lansekap Kota Tepian Air Kepulauan Tropis Nusantara**	Fauzul Rizal Sutikno dan Hendrawan H. Saragih **Studi Permukiman Pekerja Industri Di Sekitar Kawasan Sier**	Bambang Soemardiono **Kajian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Koridor Kota Surabaya**
	Erwin Iskandar, DR.; Anef Rachmat, Ir., MT **Distribusi Daerah Resapan DKI Jakarta, Melalui Pendekatan Infiltrasi Dan Iklim**	Endrawati Fatimah **Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota /Kabupaten Dengan Pendekatan Geografis Dalam Upaya Pelestarian DAS**	Fadly Usman, ST, MT **Menyoal Produk Disain Perancang Bangunan (Arsitek); Konsep, Idealisme, dan atau Hasil Kompromi? Studi Kasus: Hasil Disain Bangunan Rumah Tinggal dan RTRK di Surabaya**	Haryadi Wijayanto, Ir., MT **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan RTH Kota**
	M. Imron Rosyidi, Moehamad Aman **Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengelolaan Dan Penyelamatan Airtanah**	Hardiyati dan Eki Arsita Rizki **Kali Pepe Solo Sebagai Karamba Kota Pengembangan Segmental Kali Pepe Solo, Sebagai Potensi Wisata, Sosio-kultural dan Ekonomi**	Widya Suryadini, Winia Fanda **Pengukuran Tingkat Daya Hidup Kota Indonesia (Studi Kasus Kota Bandung)**	Untung Mardikarno, Ir. MSn **Make Up Your Face (Fenomena Pencemaran Visual Terhadap Wajah Lingkungan/ Ruang Terbuka Kota)**
	Ramadhani Yanidar **Model Dinamik Kuantitas Air Waduk**			

Dipindai dengan CamScanner

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten Dengan Pendekatan Geografis Dalam Upaya Pelestarian Das

Endrawati Fatimah
Dosen Jurusan Teknik Planologi
Universitas Trisakti
E-Mail : indo_googolendra@yahoo.com

Abstrak

Kerusakan yang terjadi di hampir semua Daerah Aliran Sungai membawa dampak pada terjadinya permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaaan di sekitarnya. Permasalahan yang paling sering terjadi terkait dengan kerusakan DAS antara lain banjir, longsor, kekeringan, polusi air dan lain sebagainya.

Di era otonomi, kerusakan DAS secara garis umum terjadi karena perencanaan tata ruang disusun melalui pendekatan administratif bukan didasarkan pada pendekatan geografis. Dengan cara pendekatan administrative, masing-masing kota maupun kabupaten menyusun rencana tata ruang didasarkan pada kepentingan internal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya eksploitasi sumber daya alam / lahan untuk kegiatan sektor ekonomi yang biasanya merupakan sektor ekonomi perkotaan (non-pertanian) karena dianggap memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan tata guna lahan yang signifikan dari peruntukan lahan yang memiliki daya resapan air tinggi ke peruntukan lahan perkotaan.

Untuk menangani kerusakan DAS serta sekaligus meminimalkan terjadi permasalahan lingkungan maka penyusunan rencana tata ruang kota maupun kabupaten haruslah didasarkan pada pendekatan geografis. Cara pendekatan ini dapat dilakukan jika terdapat koordinasi (kerja sama) antar daerah yang baik serta didukung oleh ketersediaan sistem perundang-undangan.

Key word : DAS, Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan perkotaan dewasa ini semakin kompleks dan membawa dampak terhadap keberlangsungan kegiatan perekonomian maupun kegiatan masyarakatnya. Beberapa permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perkotaan antara lain banjir, polusi udara, polusi air, keterbatasan air bersih, permasalahan persampahan dan lain sebagainya. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk disamping meningkatkan pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan terjadi peningkatan kebutuhan akan ruang. Hal inilah yang berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah konservasi (resapan air) berubah menjadi daerah binaan yang biasanya merupakan daerah kedap air. Selain untuk pemenuhan kebutuhan ruang penduduk, diera otonomi daerah ini, kota maupun kabupaten seakan-akan berkompetisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lahan secara besar-besaran.

Seperti tertuang dalam UU No. 24 / 1999 tentang Penataan Ruang, Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan / atau fungsional. Didalam UU tersebut, wilayah perencanaan RTRW (Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Tata Ruang Wilayah) meliputi RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kota/Kabupaten. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa perencanaan wilayah ditentukan lebih berdasarkan pada batas administratif dibandingkan pada batas fungsionalnya.

Sementara itu secara geografis, kota/kabupaten merupakan bagian dari suatu atau bahkan beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai). DAS itu sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang secara fungsional sebagai suatu ekosistem kesatuan wilayah tata air (Syarief, 1997). Kerusakan DAS yang menyebabkan terjadi permasalahan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, longsor, dan sebagainya salah satunya dikarenakan pendekatan perencanaan tata ruang selama ini lebih menekankan pada batas administratif.

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pentingnya pendekatan geografis dalam penyusunan rencana tata ruang kota/kabupaten sebagai upaya pelestarian ekosistem DAS guna meminimalisasikan permasalahan lingkungan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten

Pembangunan suatu kota/kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat terjadinya konversi lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi yang cenderung membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula.

Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pemanfaatan ruang (Poernomosidhi, 2002). Rencana tata ruang wilayah adalah kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk didalamnya kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah/wilayah dalam kabupaten/kota, propinsi atau nasional yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan (Muif, M, 2003). Pengertian tersebut secara implisit menyebutkan bahwa :

- Rencana Tata Ruang Wilayah pada setiap jenjang memiliki tujuan untuk memberikan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang yang optimal;
- Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah dibatasi oleh batasan administrasi yaitu Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional

Dengan dibatasinya lingkup wilayah secara administratif, maka timbul berbagai permasalahan antara lain :

- Tidak atau belum sinkronnya Tata Ruang pada perbatasan wilayah administrasi seperti (Muif, M, 2003) :
  - o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu propinsi
  - o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di wilayah batas antar propinsi
  - o RTRW Propinsi dengan propinsi lainnya dalam satu regional pulau
  - o RTRW Nasional dengan Negara lainnya yang berbatasan di satu pulau.

  Hal ini akan membawa dampak terjadinya konflik pada daerah perbatasan ataupun ketidak terpaduan pembangunan jaringan prasarana antar wilayah. Diera otonomi saat ini, permasalahan ini menjadi lebih kompleks pada jenjang RTRW kota/kabupaten karena kota/kabupaten menganggap kewenangan pemanfaatan lahan dalam wilayahnya menjadi hak mutlak dari pemerintah setempat.
- Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi dalam satuan unit perencanaan wilayah geografis (seperti DAS). Dalam hal ini tata letak suatu kota/kabupaten dilihat sebagai bagian DAS hulu atau DAS hilir. Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain seperti :
  - o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu wilayah DAS dalam

Dipindai dengan CamScanner

satu propinsi
- o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di dalam satu wilayah DAS

Perencanaan tata ruang yang didasari pada batas administrasi menyebabkan pemerintah daerah hanya berupaya untuk melaksanakan pembangunan sebanyak dan secepat mungkin demi kepentingan wilayahnya sendiri namun tidak mempertimbangkan / melupakan kepentingan daya dukung lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan. Letak suatu kota/kabupaten dalam suatu wilayah geografis, dalam hal ini DAS, akan sangat mempengaruhi kondisi kualitas dari DAS sebagai penentu sistem tata air yang ada. Rencana tata ruang kota/kabupaten yang terletak di bagian hulu DAS harus tetap memiliki peranan sebagai daerah resapan. Sejalan dengan itu, rencana tata ruang kota/kabupaten yang terletak di bagian hilir DAS harus pula ikut mendukung upaya pelestarian DAS.

Das Sebagai Satuan Unit Perencanaan Ruang Wilayah

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah atau wilayah dengan kemiringan lereng bervariasi yang dibatasi oleh punggung bukit-bukit atau gunung, yang dapat menampung seluruh curah hujan sepanjang tahun dimana air berkumpul di sungai utama kemudian dialirkan terus sampai ke laut, sehingga DAS merupakan suatu ekosistem kesatuan wilayah tata air (Syarief, 1985). Ekosistem DAS terbagi menjadi ekosistem DAS hulu dan hilir. Ekosistem DAS hulu memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem DAS secara menyeluruh. Rusaknya ekosistem DAS hulu akan berdampak pada DAS hilirnya maupun pada sistem tata air DAS secara keseluruhan.

Karakteristik DAS dibentuk oleh unsur-unsur seperti topografi, jenis tanah, vegetasi dan tata guna tanah. Apabila kondisi salah satu unsur pembentuk DAS tersebut terganggu, maka akan terganggu pula keseimbangan ekosistem DAS (Syarief, 1988). Perencanaan tata ruang sebagai pedoman pembangunan secara signifan akan memiliki keterkaitan terhadap keberlangsungan suatu DAS. Pembangunan yang merupakan pemanfaatan sumber daya lahan jelas akan merubah (mengganggu) unsur-unsur pembentuk ekosistem DAS seperti topografi, vegetasi serta tata guna tanahnya.

Oleh karena itu, penyusunan rencana tata ruang kota/kabupaten yang berbasiskan pada pendekatan geografis (wilayah DAS) perlu dilakukan dengan didasarkan oleh pertimbangan sebagai berikut (Poernomosidhi, 2002):

- Penataan ruang berimplikasi pada perubahan fungsi lahan pada suatu kawasan dan selanjutnya perubahan alih fungsi lahan tersebut akan mengubah kondisi DAS di wilayah itu, dari daerah yang dapat meresapkan air menjadi daerah kedap air. Perubahan karakteristik lahan ini menyebabkan proses perubahan air hujan pada sistem pengaliran air permukaan di DAS yaitu semakin meningkatnya limpasan air permukaan (run off) dan semakin kecilnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah.
- Pada musim penghujan, sungai di kawasan budidaya mendapatkan tambahan limpasan air dari adanya konversi lahan pada kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya beban pada sistem drainase. Hal ini juga menyebabkan tambahan pada air tanah dangkal dan dalam semakin kecil sehingga akan mengancam kelestarian air tanah yang berdampak pada terjadinya kekeringan pada musim kemarau.

Pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pembangunan merupakan salah satu bagian dalam proses perencanaan ruang. Pemanfaatan sumberdaya lahan besar sekali pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya air. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami keterkaitan antara DAS hulu dengan hilirnya dalam melakukan proses perencanaan ruang. Rusaknya ekosistem DAS hulu akibat pemanfaatan sumberdaya lahan akan merubah keseimbangan sistem tata air seluruh wilayah DAS. Bentuk dampak yang sering terjadi adalah banjir di DAS hilir yang kadang dibarengi dengan kejadian longsor dan sedimentasi. Pada kenyataannya, DAS di bagian hilir biasanya merupakan kota dengan permukiman yang padat yang memiliki karakteristik landai, coefficient run off mendekati 1 serta memiliki sistem drainage yang buruk.

Dipindai dengan CamScanner

Seperti dinyatakan oleh Sjarief, R.(2002), salah satu aspek penyebab banjir adalah karena adanya aktivitas social-ekonomi manusia yang bersifat dinamis selain aspek kondisi alam yang bersifat statis dan peristiwa alam yang bersifat dinamis. Aktifitas sosial ekonomi manusia yang bersifat dinamis antara lain meliputi

- Penggundulan hutan di daerah tangkapan air suatu sungai maupun praktek pertanian / perkebunan serta peruntukan lahan yang tidak mengikuti aspek konservasi tanah dan air.
- Tata ruang dataran banjir (secara alamiah merupakan daerah limpasan banjir) yang tidak sesuai dengan daya dukung alam seperti untuk perumahan padat, daerah industri dan perdagangan tanpa prasarana pengendalian banjir dan drainase yang memadai
- Penggunaan bantaran sungai untuk perumahan resmi maupun liar akan menghambat aliran sungai sehingga muka air sungai makin tinggi
- Hilangnya daerah retensi banjir (dataran rendah pengelak banjir) untuk peruntukan lain (perumahan, daerah industri, dll)
- Perilaku masyarakat yang menganggap sungai dan saluran air/ drainase sebagai tempat pembuangan segala macam sampah menyebabkan pendangkalan sungai dan rusak/macetnya prasarana peralatan pengendali banjir
- Masih terbatasnya prasarana drainase terutama di kawasan perkotaan
- Semakin meluasnya penurunan permukaan tanah pada daerah perkotaan akibat terjadinya penghisapan air tanah yang berlebihan

Jika dicermati, perencanaan tata ruang kota/kabupaten, yang merupakan pedoman pembangunan, sebenarnya dapat berguna dalam mengantisipasi permasalahan banjir. Terlepas dari penyimpangan dalam pelaksanaannya, perencanaan tata ruang kota/kabupaten yang ada saat ini lebih memberikan prioritas pada kepentingan peningkatan kegiatan perekonomian dan lebih kepada kepentingan wilayah dalam lingkup administrasinya.

Terpakunya lingkup perencanaan yang dibatasi oleh batas administrasi telah mengesampingkan proses perjalanan daur hidrologi secara utuh. DAS yang merupakan ekosistem yang memanjang dari daerah hulu sampai ke hilir dan dibatasi secara geografis serta dapat menyambung berbagai batas administrasi. Pengelolaan sumberdaya air membutuhkan satu manajemen yang memungkinkan terpadunya sistem hidrologi dalam suatu kesatuan perencanaan ruang (Burhannudin, H dan Ernawati, 2003).

Seperti telah disebutkan dimuka, DAS, dengan karakteristiknya dan memiliki keterkaitan utuh dari hulu sampai ke hilirnya, memerlukan pengelolaan yang cermat dan terukur. Cermat dalam pengertian pengelolaan harus didasari kemampuan memahami dampak yang mungkin terjadi apabila bagian-bagian DAS tersebut mengalami perubahan. Sedangkan terukur mengandung pemgertian pengelolaan harus disertai kemampuan menghitung keterbatasan DAS dalam mendukung kegiatan di atasnya sehingga lebih bijaksana dan proporsional dalam rangka memanfaatkannya.

Oleh karena itu, DAS secara utuh sebagai suatu kesatuan wilayah yang secara fungsional memiliki peranan dalam sistem tata air seharusnya dipandang sebagai unit pengembangan wilayah. Sebagai konsekuensinya, setiap DAS haruslah memiliki perencanaan tata ruang yang terpadu yang didasarkan pada daya dukungnya. Berkaitan dengan keberadaan kota/kabupaten yang merupakan bagian dari DAS, maka sudah seharusnya perencanaan tata ruang DAS menjadi pedoman bagi penyusunan rencana tata ruang kota/kabupaten yang terletak didalamnya.

Kota/Kabupaten Dalam Konteks Wilayah DAS

Kota/kabupaten sebagai suatu wilayah administratif, secara geografis akan selalu merupakan bagian dari suatu atau lebih DAS. Pemanfaatan lahan yang terjadi di kota/kabupaten akan merubah tata guna lahan DAS secara menyeluruh. Sementara itu pemanfaatan lahan diperlukan untuk pembangunan guna memenuhi

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan aktifitas penduduk yang makin bertambah maupun kebutuhan perekonomian kota maupun kabupaten. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah adalah sejauh mana lahan dapat dimanfaatkan maupun diubah bagi pembangunan tanpa merusak DAS?.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab apabila setiap DAS memiliki suatu perencanaan tata ruang yang telah mengukur keterbatasan DAS dalam mendukung kegiatan diatasnya. Perencanaan tata ruang wilayah DAS tersebut yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten. Penyusunan rencana tata ruang wilayah DAS tersebut haruslah melibatkan seluruh stakeholders yang ada terutama pemerintah kota/kabupaten.
Untuk itu diperlukan suatu koordinasi / kerjasama antar kota/kabupatendalam suatu DAS guna penyusunan rencana tata ruang wilayah DAS. Koordinasi ataupun kerjasama tersebut dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang tercakup dalam suatu DAS, antara lain seperti :

- Di koordinasi pada tingkat propinsi apabila lingkup wilayah DAS hanya terdiri dari beberapa kota/kabupaten dalam 1 (satu) propinsi
- Di koordinasi pada tingkat antar-propinsi apabila lingkup wilayah DAS mencakup beberapa kota/kabupaten pada lebih dari 1 (satu) propinsi

Dilain pihak suatu kota/kabupaten mungkin juga termasuk dalam lingkup lebih dari satu DAS, untuk itu kota/kabupaten tersebut haruslah berperan dalam koordinasi/kerjasama pada setiap penyusunan rencana tata ruang setiap DAS yang terkait dengannya.

Penyusunan rencana tata ruang melalui pendekatan geografis (lingkup DAS) mempunyai implikasi akan adanya pembatasan penggunaan sumberdaya lahan. Disatu sisi pembatasan bisa merupakan suatu kebijakan yang tidak popular di era otonomi ini karena dianggap menghambat kemajuan ekonomi suatu kota/kabupaten. Disisi lain pembatasan ini merupakan suatu keharusan apabila kelestarian sumberdaya alam serta upaya antisipasi permasalahan lingkungan menjadi pegangan dengan harapan akan terjadinya keberlanjutan pembangunan. Koordinasi serta kerjasama yang baik antar daerah memegang peranan penting dalam implementasi konsep penyusunan rencana tata ruang berbasis geografis ini.

Penutup

Untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan diperlukan kemauan dan keberanian untuk lebih mengedepankan pertimbangan ekologi sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi. Peristiwa banjir maupun sebaliknya kekeringan yang justru timbul sebagai konsekuensi dari eksplorasi sumberdaya alam yang berlebih, harus bias dijadikan cermin untuk dapat melangkah lebih bijaksana dalam memperlakukan kemampuan alam yang tidak tak terbatas ini.

Dalam era otonomi daerah ini, perencanaan kota/kabupaten seharusnya tidak hanya mengedepankan kepentingan lokal tapi juga secara arif haruslah mempertimbangan keberlangsungan lingkungan regionalnya. Keterpakuan lingkup perencanaan yang hanya dibatasi oleh batas administratif menyebabkan proses daur hidrologi secara utuh dalam lingkup wilayah DAS (dimana secara geografis kota/kabupaten tersebut terletak) menjadi tidak dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Untuk itu diperlukan suatu upaya koordinasi / kerja antar daerah dalam satu lingkup wilayah DAS dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga secara menyeluruh akan tersusunlah suatu rencana tata ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi pada kepentingan bersama.

Daftar pustaka

1 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah
3 Hani Burhanudin dan Ernawati, 2003, Perencanaan Ruang Berbasis Mitigasi Banjir (Pendekatan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Aliran Sungai), Seminar dan Konggres Nasional II ASPI. Universitas Pakuan, Bogor.
4. Poernomosidhi, 2002, Pendekatan Tata Ruang dalam Upaya Pengendalian Banjir. Denpasar
5. Sasongko, H, 2005, Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Penanganan Permasalahannya, makalah disampaikan dalam kuliah umum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Planologi, Universitas Trisakti, 21 Juni 2005
6. Sjarief, R, 2002, "Implementasi Konsep Integrated Management dalam pengendalian banjir dengan penekanan pada Kebijakan-Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah", makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Implementasi Konsep Integrated Management Dalam Pengendalian Banjir, FALTL, Universitas Trisati, 27 Juni 2002
7. Syarief, 1997, Kawasan Perdesaan ditinjau dari Sistem Tata Air Daerah Aliran Sungai (DAS), ITB, 1997

Dipindai dengan CamScanner

SEMINAR NASIONAL
PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
PERKOTAAN DI
INDONESIA

Masalah, Tantangan
dan Peluang dalam
Menghadapi Era
Globalisasi

Jakarta
26-27 Juli 2005

FAKULTAS
ARSITEKTUR LANSEKAP
dan
TEKNOLOGI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS TRISAKTI
2005

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Ir. Endrawati Fatimah, MPST

sebagai

~~PESERTA~~ / PEMAKALAH / ~~MODERATOR~~ / ~~PANITIA~~

pada

Seminar Nasional
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERKOTAAN DI INDONESIA
Masalah, Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Era Globalisasi
yang diselenggarakan oleh FALTL Universitas Trisakti
Jakarta, 26 - 27 Juli 2005

Jakarta, 27 Juli 2005

DEKAN FALTL
UNIVERSITAS TRISAKTI

Prof. Dr. Ir. Soepangat Soemarto, MSc

KETUA PELAKSANA

Dr. Melati Ferlanita-Fachrul, MS

Dipindai dengan CamScanner

cek similarity pemb di era otonomi daerah

by Wisely FALTL

Submission date: 17-Mar-2024 11:13PM (UTC+0700)
Submission ID: 2322326396
File name: Artikel_SemNas_ASPI_UNTAR.pdf (140.06K)
Word count: 2212
Character count: 15262

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH *)

Endrawati Fatimah
Dosen Jurusan Teknik Planologi
Universitas Trisakti
E-Mail : indo_googolendra@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan suatu kota/kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat terjadinya konversi lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi yang cenderung membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula. Dalam melaksanakan pembangunan, setiap pemerintahan daerah memiliki rencana tata ruang yang ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pemanfaatan ruang (Poernomosidhi, 2002).

Diera otonomi saat ini, dimana setiap daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengelola kekayaan sumberdaya alam dan buatan di wilayahnya membawa dampak makin maraknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka keterpaduan yang mengikat yang lebih mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Beberapa permasalahan mulai timbul antara lain konflik antar daerah berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, timbulnya permasalahan lingkungan seperti banjir dan kekeringan serta terjadinya ketidak terpaduan pengembangan perekonomian antar daerah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah dikhawatirkan akan lebih memperparah kondisi permasalahan yang ada. Salah satu hal yang mendasar yang tidak tertuang dalam UU Nomor 32/2004 adalah tidak diaturnya suatu hirarki penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk tidak terdapatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal ini akan menyebabkan, Rencana Tata Ruang Provinsi maupun Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten tidak memiliki arahan yang jelas yang pada akhirnya secara nasional pembangunan menjadi tidak terpadu yang pada akhirnya akan menyebabkan permasalahan lingkungan yang makin kompleks.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas pentingnya suatu pedoman / acuan yang jelas tentang penyusunan rencana tata ruang mengingat dampak dari pemanfaatan ruang bukan lagi bersifat lokal namun dapat bersifat regional bahkan nasional. Hal ini perlu dilakukan guna menciptakan suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa mengurangi wewenang yang telah diberikan dalam era otonomi ini.

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres III ASPI " Pembangunan Perkotaan Berbasis Multi Stakeholders Dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi, Jakarta, 25-26 Agustus 2005.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu kota/kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat terjadinya konversi lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi yang cenderung membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula.

Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pemanfaatan ruang (Poernomosidhi, 2002). Rencana tata ruang wilayah adalah kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk didalamnya kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah/wilayah dalam kabupaten/kota, propinsi atau nasional yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan (Muif, M, 2003).

Dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Demikian pula dengan mulai diberlakukannya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 kewenangan Pemerintah Daerah makin jelas meskipun dalam Undang-undang ini telah lebih mengatur adanya hubungan kerjasama antar daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah menjadi memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Konsekuensi dari hal tersebut antara lain makin maraknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka keterpaduan yang mengikat yang lebih mengedapankan kepentingan wilayah yang lebih luas dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh.

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG TAHUN 1992-2004

Seperti tertuang dalam UU No. 24 / 1992 tentang Penataan Ruang, Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait

padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan / atau fungsional. Didalam UU tersebut, wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) meliputi RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kota/Kabupaten. Undang-undang Nomor 24/1992 tersebut secara jelas mengatur hirarki dari rencana tata ruang. RTRW Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RTRW provinsi (Daerah Tingkat I) dan selanjutnya RTRW provinsi (Daerah Tingkat I) menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota/Kabupaten (Daerah Tingkat II).

Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang – Undang Nomor 22/99 tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu pertimbangannya adalah dalam menghadapi perkembangan keadaan , baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu diselenggarakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dalam pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka daerah otonom dibedakan atas Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Kewenangan yang diberikan kepada Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang meliputi :

- Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro
- Dana perimbangan keuangan
- Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
- Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis
- Konservasi
- Standarisasi nasional

Selanjutnya dijelaskan bahwa Propinsi memiliki kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Selain itu, propinsi memiliki kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya yang meliputi :

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

- Pelatihan bidang, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi
- Pengelolaan pelabuhan regional
- Pengendalian lingkungan hidup
- Promosi dagang dan budaya/pariwisata
- Perencanaan tata ruang propinsi

Guna melaksanaan Undang-undang tersebut, lebih lanjut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa :

- Kewenangan Pemerintah dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
    1. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan ruang nasional tata ruang Kabupaten/kota dan Propinsi
    2. Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai
    3. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil
    4. Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas propinsi
- Kewenangan Propinsi dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
    1. Penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/kota
    2. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut tidak berumur lama karena saat ini sudah berlaku dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu pertimbangannya bahwa undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa perubahan mendasar terkait dengan penataan ruang antara lain bahwa :

1. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini telah dilakukan penghapusan pada wewenang Pemerintah dalam bidang lain termasuk kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro ;

2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang antara lain meliputi :
    a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
    b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota antara lain meliputi :
    a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
    b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

Dalam undang-undang ini, prosedur penyusunan rencana tata ruang tampak makin bersifat otonom dan tidak memiliki hirarki baik bottom – up maupun top - down. Meskipun demikian hubungan kerjasama antar pemerintah daerah lebih diatur secara rinci seperti hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya.

BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL

Sistem perundang-undangan yang ada selama ini terkait dengan penataan ruang memiliki kesamaan pandangan yaitu melihat wilayah hanya sebagai ruang yang dibatasi oleh batas administrasi atau sebagai daerah administrasi. Sedangkan pada kenyataannya, wilayah juga merupakan ruang yang memiliki batas geografis maupun fungsional. Perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pembangunan akan memiliki dampak terhadap daerah di luar wilayah administratifnya.

Dengan dibatasinya lingkup wilayah secara administratif, maka timbul berbagai permasalahan antara lain :

- Tidak atau belum sinkronnya Tata Ruang pada perbatasan wilayah administrasi seperti (Muif, M. 2003) :
    - RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu propinsi
    - RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di wilayah batas antar propinsi

- RTRW Propinsi dengan propinsi lainnya dalam satu regional pulau
- RTRW Nasional dengan Negara lainnya yang berbatasan di satu pulau.

Hal ini akan membawa dampak terjadinya konflik pada daerah perbatasan ataupun ketidak terpaduan pembangunan jaringan prasarana antar wilayah. Diera otonomi saat ini, permasalahan ini menjadi lebih kompleks pada jenjang RTRW kota/kabupaten karena kota/kabupaten menganggap kewenangan pemanfaatan lahan dalam wilayahnya menjadi hak mutlak dari pemerintah setempat. Masing-masing daerah otonom sangat bersemangat dalam membangun daerahnya sehingga tiap daerah menginginkan ketersediaan sarana, prasarana, maupun pelayanan yang sama.

- Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi dalam satuan unit perencanaan wilayah geografis (seperti DAS, daerah rawan bencana, kawasan pesisir, dll). Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain seperti :
  - RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu wilayah geografis dalam satu propinsi.
  - RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di dalam satu wilayah geografis.

- Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi dalam satuan unit perencanaan wilayah pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain seperti :
  - Rencana pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang tercerminkan dalam RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu wilayah yang memiliki ciri ekonomi, sosial dan budaya saling terkait dalam satu propinsi.
  - RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di dalam satu wilayah yang memiliki ciri ekonomi, sosial dan budaya saling terkait dalam satu propinsi.

Perencanaan tata ruang yang didasari pada batas administrasi menyebabkan pemerintah daerah hanya berupaya untuk melaksanakan pembangunan sebanyak dan

secepat mungkin demi kepentingan wilayahnya sendiri namun tidak mempertimbangkan / melupakan kepentingan daya dukung lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut maka dimungkinkan terjadinya berbagai permasalahan antara lain :

- Pembangunan Nasional tidak dapat berlangsung secara merata. Kesenjangan antar daerah makin menjadi lebih nyata
- Akan timbul kota/kabupaten yang perkembangan kota yang kehilangan identitas diri. Hal ini disebabkan kota/kabupaten bercermin pada kota/kabupaten yang lebih maju tanpa melihat potensi yang dimilikinya dengan maksud untuk mencontoh kemajuan yang dimiliki kota/kabupaten lain.

REKOMENDASI

Sampai dengan saat ini, Undang-undang No 24/1992 tentang Penataan Ruang sedang dalam proses untuk direvisi. Berdasarkan pada uraian diatas maka beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan revisi antara lain :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah haruslah diberikan wewenang dalam menetapkan pedoman dan arahan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian tata ruang untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang Kabupaten/Kota. Pedoman dan arahan tersebut sebaiknya bersifat fisik penentuan kawasan lindung, resapan air (penentuan KDB) dll.
2. Perencanaan tata ruang kawasan yang memiliki fungsi ekologis yang meliputi lebih dari satu Daerah Kabupaten/kota seperti daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung, kawasan pesisir, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, dll. perlu diatur prosedur penyusunannya sehingga rencana tata ruang Kabupaten/Kota dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek ekologis tersebut.
3. Pemerintah harus memiliki rencana pengembangan ekonomi wilayah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perekonomian daerah dan tercermin dalam perencanaan tata ruang.

PENUTUP

Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila dilandasi dengan perencanaan tata ruang yang menekankan pada aspek ekologis secara menyeluruh tanpa mengurangi kepentingan mempercepat peningkatan perekonomian daerah. Diera otonomi ini, undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang.

Dengan adanya kewenangan penuh tersebut, Daerah Kabupaten/Kota seakan-akan tidak memiliki acuan / pedoman maupun batasan dan dikawatirkan lepas kontrol dengan berkedok pada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai akibatnya, berbagai permasalahan akan muncul seperti ketidak terpaduan tata ruang antar daerah, konflik pemanfaatan lahan, serta kerusakan lingkungan yang makin kompleks.

Sementara itu, sistem perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang (UU No 24/1992) sudah tidak sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-undang tentang Penataan Ruang yang mengatur tentang peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi yang diberikan dalam makalah ini dapat dilihat sebagai suatu pembatasan bagi kewenangan penuh yang telah diberikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disatu sisi pembatasan ini bisa merupakan suatu kebijakan yang tidak popular di era otonomi ini karena dianggap menghambat kemajuan ekonomi suatu kota/kabupaten. Disisi lain pembatasan ini merupakan suatu keharusan apabila kelestarian sumberdaya alam, keterpaduan dan peningkatan perekonomian secara merata serta upaya antisipasi permasalahan lingkungan menjadi pegangan dengan harapan akan terjadinya keberlanjutan pembangunan nasional.

Daftar pustaka :

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Endrawati F., 2005 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dengan Pendekatan Geografis dalam upaya Pelestarian DAS, Seminar Nasional Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Indonesia, Jakarta 26-27 Juli 2005, Fakultas Arsitektur Lansekap dan teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti.

Hani Burhanudin dan Ernawati, 2003 Perencanaan Ruang Berbasis Mitigasi Banjir (Pendekatan Daerah Aliran Sungai), Seminar dan Konggres Nasional II ASPI, Universitas Pakuan, Bogor.

Poernomosidhi, 2002 Pendekatan Tata Ruang dalam Upaya Pengendalian Banjir, Denpasar.

Sasongko, H, 2005 Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Penanganan Permasalahannya, makalah disampaikan dalam kuliah umum Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Planologi, Universitas Trisakti, 21 Juni 2005.

Sjarief, R, 2002 "Implementasi Konsep Integrated Management dalam pengendalian banjir dengan penekanan pada Kebijakan-Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah", makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Implementasi Konsep Integrated Management Dalam Pengendalian Banjir, FALTL, Universitas Trisati, 27 Juni 2002

cek similarity pemb di era otonomi daerah

ORIGINALITY REPORT

19%	15%	16%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Nawawi Nawawi. "Otoritas Manajemen Mutu Madrasah di Era Otonomi", INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 1970 Publication	3%
2	Winanda Kusuma, Sieska Afriana Sintasari. "Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah", CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023 Publication	2%
3	Affila Affila. "Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2020 Publication	1%
4	jdih.tanjabtimkab.go.id Internet Source	1%
5	controlphoenix.blogspot.com Internet Source	1%
6	tegal.ayoindonesia.com Internet Source	1%

7	www.bukupr.com Internet Source	1 %
8	bayualfian.blogspot.com Internet Source	1 %
9	Sarah Pasha Fadilla, Hesti Dwi Astuti. "DAMPAK PENANAMAN SERAI WANGI TERHADAP LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKANAGARA)", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2019 Publication	1 %
10	ejournal.uksw.edu Internet Source	1 %
11	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	1 %
12	Istanto Istanto, Ahmad Yani, Spfyan Tsauri, Sri Handayani. "Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022 Publication	1 %
13	Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang	1 %

Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

14	biroorganisasi.jogjaprov.go.id Internet Source	1 %
15	Siswantari --. "Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 Publication	1 %
16	read.bookcreator.com Internet Source	1 %
17	dairikab.go.id Internet Source	<1 %
18	mediainstanbelajar.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 10 words
Exclude bibliography	On		

cek similarity pemb di era otonomi daerah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9